

**TERM OF REFERENCE**  
**( KERANGKA ACUAN KERJA )**

**KEGIATAN**

**PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS  
KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI**

**SUB KEGIATAN**

**PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS  
KELUARGA KEWENANGAN PROVINSI**

1. Lembaga : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Total Dana : Rp 302.950.944,-
5. Keluaran : Meningkatnya kontribusi Perempuan dalam Pendapatan
6. Sasaran : Perempuan Produktif dan Masyarakat
  
7. Sub Kegiatan :
  - 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

**1. LATAR BELAKANG**

Jumlah penduduk di Kepulauan Riau sebanyak 270,2 juta jiwa pada 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 213,592 jiwa penduduk di provinsi dengan ibu kota Tanjungpinang. Adapun Batam tercatat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi yang memiliki luas 8.201 km persegi, yakni sebanyak 1 421 961 jiwa.

Kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meskipun secara umum pencapaian pembangunan gender semakin meningkat. Berdasarkan data IDG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 61,58 masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 75,24,

Capaian IPG Provinsi Kepri sangat baik yakni 93,10 diatas Nasional 91,07 begitu juga dengan IPM Provinsi Kepri adalah 75,48 diatas nasional 71,92 Sementara Capaian IDG Provinsi Kepri tahun 2019 sebesar 61,58 juga cukup baik, berada sedikit rata-rata dibawah nasional sebesar 75,24, berikut tabelnya:

| NO       | KABUPATEN/KOTA        | 2019         |              |              | 2018         |              |              |
|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                       | IPM          | IPG          | IDG          | IPM          | IPG          | IDG          |
| 1        | Batam                 | 81,09        | 94,42        | 58,40        | 80,54        | 94,22        | 53,29        |
| 2        | Bintan                | 73,98        | 93,10        | 69,71        | 73,41        | 92,79        | 63,41        |
| 3        | Tanjungpinang         | 78,73        | 96,77        | 76,13        | 78,33        | 96,47        | 68,57        |
| 4        | Karimun               | 71,10        | 90,91        | 64,17        | 70,56        | 91,48        | 57,03        |
| 5        | Lingga                | 64,98        | 90,16        | 48,96        | 64,06        | 89,29        | 46,08        |
| 6        | Natuna                | 72,63        | 91,72        | 42,02        | 72,10        | 91,62        | 49,17        |
| 7        | Anambas               | 68,48        | 90,16        | 57,74        | 67,53        | 90,12        | 57,32        |
| <b>8</b> | <b>Provinsi Kepri</b> | <b>75,48</b> | <b>93,10</b> | <b>61,58</b> | <b>74,84</b> | <b>92,97</b> | <b>66,18</b> |
| <b>9</b> | <b>Indonesia</b>      | <b>71,92</b> | <b>93,10</b> | <b>75,24</b> | <b>68,63</b> | <b>90,99</b> | <b>72,10</b> |

Terdapat kesenjangan antar kabupaten/ kota. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, hukum dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Indikator pemberdayaan gender tersebut secara universal telah digunakan sebagai instrument untuk mengukur bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dalam akses, penerimaan manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

### Komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

| Provinsi       | Keterlibatan<br>Perempuan di<br>Parlemen<br>(Persen) | Perempuan<br>sebagai<br>Tenaga<br>Profesional<br>(Persen) | Sumbangan<br>Pendapatan<br>Perempuan<br>(Persen) | IDG   |
|----------------|--|---|--|-------|
| Provinsi Kepri | 11.11  | 43.16   | 28.61  | 61.58 |
| Indonesia      | 17.32  | 47.02   | 36.7   | 72.10 |

### Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepri

| Tahun | Angka<br>Harapan<br>Hidup<br>(tahun) | Harapan<br>Lama<br>Sekolah<br>(tahun) | Rata-rata<br>lama<br>Sekolah<br>(tahun) | Pengeluaran<br>Perkapita<br>disesuaikan<br>(ribu rupiah<br>PPP) | IPM   | IPG  |        |        |       |       |       |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|------|--------|--------|-------|-------|-------|
|       | L                                    | P                                     | L                                       | P   | L     | P    |        |        |       |       |       |
| 2018  | 67,76                                | 71,56                                 | 12,82                                   | 12,89   | 10,01 | 9,60 | 19.939 | 12.268 | 67,76 | 71,56 | 92,97 |
| 2019  | 67,92                                | 71,73                                 | 12,83                                   | 12,90   | 10,19 | 9,77 | 20.541 | 12.712 | 79.23 | 73.76 | 93.10 |

Sumber daya manusia atau penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, karena SDM atau penduduk adalah pelaku, sasaran sekaligus penerima hasil pembangunan. Berdasarkan perbandingan capaian indikator Pembangunan Manusia, IPM Provinsi Kepri tahun 2019 sebesar 75,48 di mana IPM laki laki sebesar 79,23 dan Perempuan sebesar 73,76. Jika dilihat dari indikator pembentuknya tampak bahwa dari kesenjangan pembangunan gender terletak pada aspek ekonomi, dimana pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2019 laki laki

jauh diatas perempuan ( laki laki sebesar Rp 20,541 dan Perempuan hanya sebesar Rp. 12.712).

Apabila ditilik dari indikator Indeks Pemberdayaan Gender, IDG Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 masih relative rendah, yakni sebesar 61.58 jauh dibawah capaian IDG Nasional sebesar 75.24 . Jika dilihat dari komponen pembentuknya, maka rendahnya capaian IDG Kepri terutama disebabkan oleh rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 11.11 persen dan rendahnya prosentase sumbangsih pendapatan perempuan yang hanya sebesar sebesar 28,61 persen.

Di satu dekade terakhir ini perempuan seolah menjadi bintang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berbicara mengenai ekonomi adalah juga berbicara mengenai perempuan, sebab kenyataannya, perempuan adalah *agent of development* yang perannya sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian. Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Saat perempuan menjadi kaum terdidik, mempunyai hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, inilah tanda kesejahteraan rumah tangga meningkat Lebih dari seabad lalu telah dikemukakan Kartini, bahwa tiap perempuan mesti memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya punya kuasa dan posisi dalam hubungan domestik, keluarga, dan lingkungan sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran perempuan di dalam membangun ketahanan ekonomi, sudah dirasakan dampaknya, terutama dalam sektor informal. Perempuan yang populasinya hampir sama dengan laki-laki adalah sumber daya manusia yang potensial bagi pembangunan.

Berikut beberapa Faktor kesenjangan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Terampil antara lain:

**Segi Akses:**

- Akses perempuan dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan masih rendah

**Segi Partisipasi**

- Partisipasi perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga masih rendah

**Segi Kontrol:**

- Kontrol keuangan keluarga masih di dominasi laki-laki

**Segi Manfaat:**

- Manfaat pembangunan belum maksimal dirasakan oleh perempuan

Untuk kesenjangan Internal antara lain:

- Masih belum maksimal nya Kordinasi ke instansi atau stakeholder terkait pemberdayaan perempuan bidang ekonomi

Untuk kesenjangan Eksternal antara lain

- Masih adanya anggapan bahwa partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga belum menjadi prioritas di masyarakat
- Perempuan bekerja masih dianggap membantu suaminya
- Masih adanya anggapan perempuan yang bekerja diluar mentelantarkan rumah tangga
- Masih rendahnya posisi tawar perempuan terhadap upah pekerjaan

Partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi yang sangat penting itu tidak hanya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kalangan perempuan, tetapi juga sebagai pondasi yang kokoh di sektor lain. Perempuan merupakan aset dan potensi luar biasa untuk mengurangi angka kemiskinan, mewujudkan pembangunan, perdamaian, dan keamanan. Jika mereka diberdayakan secara ekonomi dan intelektualitas, maka akan sangat efektif bagi pengembangan masyarakat dan bangsa. Namun untuk mengatasi masalah perempuan yang semakin kompleks, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan perempuan, maka diperlukan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Terampil Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan mengadakan berbagai pelatihan dan bimbingan guna menciptakan kemandirian di kalangan kaum perempuan.

Program-program pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ditujukan untuk menstimulasi pengembangan usaha perempuan serta menggugah partisipasi stakeholder dalam pengembangan usaha perempuan dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat kaum perempuan dan dunia usaha dalam pengembangan perlindungan sosial melalui usaha dan sumber pembiayaan, meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin di berbagai kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap informasi, teknologi tepat guna dan berbagai sumber

pembiayaan, serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Tak hanya itu, dengan mempersiapkan perempuan untuk berpartisipasi secara kompetitif dalam ekonomi, maka akan memungkinkan perusahaan-perusahaan mendapatkan orang-orang terbaik untuk bekerja dan berkembang tanpa membedakan gender.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **a. Maksud:**

Peningkatan life skill (kecakapan) serta kompetensi (keahlian) perempuan yang pada gilirannya memiliki sikap hidup, kepribadian hidup, dan kemampuan hidup yang meningkat, menjadikan perempuan mitra sejajar dengan kaum laki-laki

### **b. Tujuan**

Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta kepedulian dan peran serta perempuan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi perempuan.

## **3. SASARAN**

- Perempuan Produktif
- Masyarakat

## **4. PELAKSANAAN**

### **a. Metode pelaksanaan**

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dilaksanakan menggunakan metode pengajaran dan pembinaan.

**b. Tahapan pelaksanaan**

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dilaksanakan 3 (tiga) tahapan kegiatan yaitu:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi
  - 2) Pembinaan Tenaga Pengrajin, Tenaga Staff Administrasi dan Tenaga Keamanan
  - 3) Pelatihan Keterampilan Perempuan

### c. Pelaksana Kegiatan

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari:



- Penanggung jawab Kegiatan

Penanggungjawab Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau.

#### **d. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Tahun 2021 adalah masyarakat pada umumnya, khususnya Perempuan produktif dan pelaku usaha di Provinsi Kepri.

#### **e. Waktu Pelaksanaan**

Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 selama satu tahun.

| NO | KEGIATAN               | Triwulan I |     |     | Triwulan II |     |      | Triwulan III |      |      | Triwulan IV |     |     |
|----|------------------------|------------|-----|-----|-------------|-----|------|--------------|------|------|-------------|-----|-----|
|    |                        | Jan        | Feb | Mar | April       | Mei | Juni | Juli         | Agus | Sept | Okt         | Nop | Des |
| 1  | Kegiatan adm           |            |     |     |             |     |      |              |      |      |             |     |     |
| 2  | Persiapan Kegiatan     |            |     |     |             |     |      |              |      |      |             |     |     |
| 3  | Pelaksanaan Kegiatan   |            |     |     |             |     |      |              |      |      |             |     |     |
| 4  | Evaluasi dan Pelaporan |            |     |     |             |     |      |              |      |      |             |     |     |

### **5. PEMBIAYAAN**

Berdasarkan resiko beban biaya, pelaksanaan Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi dengan anggaran biaya sebesar Rp. **302.950.944,-(Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

| No | No. Rekening | Jenis Belanja                     | Jumlah (Rp) |
|----|--------------|-----------------------------------|-------------|
| 1  | 5.1.02       | Belanja Barang dan Jasa           | 295.950.944 |
| 1  | 5.2.02       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 7.216.000   |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Total</b> | <b>302.950.944</b> |
|--------------|--------------------|

## **6. JENIS PELAPORAN YANG DIPERLUKAN / DISYARATKAN.**

Untuk mengendalikan agar pekerjaan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka harus disusun laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai setelah kegiatan dilaksanakan.

## **7. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja Sub Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi ini dibuat, dengan harapan semoga semua potensi, daya upaya, tenaga, dan pikiran yang telah disumbangkan dapat bermanfaat dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan cita – cita kita bersama untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN,



MISNI, S.KM, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19730516 199903 2 007